

**PENGUNAAN TAMAN BUNGKUL SEBAGAI RUANG PUBLIK DALAM  
MEWUJUDKAN DEMOKRASI DELIBERATIF (STUDI KASUS TERHADAP  
KOMUNITAS SENOPATI)**

**Faridah ([faadha@ymail.com](mailto:faadha@ymail.com)) dan Arifin Rahman**

**ABSTRAK**

Taman Bungkul sebagai ruang publik dijadikan tempat untuk berkumpulnya berbagai komunitas di Surabaya. Komunitas-komunitas ini tidak hanya berkumpul tetapi juga saling tukar-menukar pendapat ataupun argumentasi, sehingga ada wadah untuk menampung aspirasi mereka. Aspirasi yang ditampung ditindak lanjuti dengan menyampaikannya atau menyalurkannya ke pemerintah kota Surabaya. Komunitas yang mewujudkan Demokrasi Deliberatif ini salah satunya komunitas SENOPATI. Komunitas ini berperan aktif dalam menentukan suatu kebijakan pemerintah terkait jalan khusus sepeda onthel yang telah diputuskan dengan terbukti di sepanjang jalan raya Darmo, Urip Sumoharjo, jalan Pemuda, Basuki Rahmat dan Gubernur Suryo terdapat tanda khusus sepeda onthel dengan warna hijau dan ada tanda sepeda onthel serta warna jingga (*orange*) yang disponsori oleh cat EMCO.

Taman Bungkul dijadikan tempat untuk melakukan berbagai aktivitas oleh berbagai kalangan. Kegunaan yang begitu banyak dari taman Bungkul ini menjadikan menarik untuk diketahui. Terutama dalam penelitian ini yang berusaha untuk mengetahui kegunaan dari taman Bungkul sebagai tempat untuk mewujudkan Demokrasi Deliberatif.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *snowball sampling* untuk penentuan sampelnya. Pengumpulan data menggunakan *triangulasi*, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif model Miles and Huberman.

Kata kunci: Penggunaan taman Bungkul, Ruang Publik, Demokrasi Deliberatif

**ABSTRACT**

*Bungkul City Park as a public space is made use as a place where various communities in Surabaya have gatherings. Those communities do not only gather around, but also share opinions and/or arguments, so that Taman Bungkul City Park becomes a place to relocate their aspirations, that is how using Taman Bungkul City Park as a public space is realized. The relocated aspirations are then followed by delivering them to the City Government of Surabaya. One of communities that are realizing the deliberate democracy is SENOPATI community. This community is actively involved in determining one of the government policies regarding to specific track for bicycle which is already realized on several spots. Along the roads of Raya Darmo, Urip Sumoharjo, Pemuda, Basuki Rahmat, and Gubernur Suryo, there are green and orange marks with the picture of a bicycle on the roads, which is sponsored by EMCO.*

*Bungkul city park used to be place to do some activities by a lot of people. A lot of advantages of the Bungkul city park make it interested to knew. A specially for this research that want know about the used of Bungkul city park be place to realized the Deliberative Democration.*

*This research is descriptive-qualitative research which uses snowball sampling technique in determining the samples. The data collection makes use of triangulation, which is using observation, in-depth interview, and documentation to the same source of data*

*simultaneously. The data analysis technique that is used in this study is Miles and Huberman's model of qualitative data analysis.*

*Keywords: the use of Taman Bugkul City Park, public space, Deliberate Democracy*

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat multikultural yang tinggi. Di Indonesia, terdapat latar belakang yang berbeda-beda dalam hal suku, bangsa, bahasa dan agama. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan integrasi dan/atau degradasi dalam masyarakat. Integrasi terhadap satu kelompok masyarakat tertentu yang semakin menyatu karena kecintaan dalam kelompok, sedangkan degradasi yang berakibat kepada disintegrasi terjadi karena terdapat kesalahpahaman yang berakibat pada gesekan kelompok tertentu, sehingga memunculkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan konsensus yang dapat menyatukan segala perbedaan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”, maka sudah dapat dipastikan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai Negara demokrasi, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dalam berargumen dan menuangkan aspirasinya. Indonesia sendiri telah melaksanakan prinsip-prinsip dari pemerintahan demokrasi. Salah satunya adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dalam setiap lapisannya.

Demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Beberapa tahun terakhir ini didominasi oleh usaha-usaha Indonesia untuk bangkit dari bayang-bayang Orde Baru, rezim otoriter yang dibangun oleh Presiden Soeharto pada pertengahan 1960-an. Soeharto membangun rezim ini di atas fondasi Demokrasi Terpimpin yang ditinggalkan Soekarno. Pemberlakuan Demokrasi Terpimpin pada 1959 menyebabkan runtuhnya Demokrasi Parlementer dan menggantikannya dengan sebuah sistem yang tidak membatasi lembaga kepresidenan (Rahman, 2010:1).

Seiring dengan pasang-surutnya demokrasi di Indonesia, perkembangan budaya politik Indonesia juga mengalami kemajuan. Jika pada masa sebelum reformasi budaya politik Indonesia masih cenderung pada budaya politik parokial-subjek, maka setelah reformasi budaya politik Indonesia lebih mengarah pada budaya politik subjek-partisipan. Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah relatif maju, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, namun sebagian memiliki kesadaran politik tinggi, sebagian lagi masih bersifat pasif. Hal ini

ditandai dengan adanya golongan putih (golput), yaitu orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dan memilih bersikap netral.

Perkembangan zaman membuat bangsa Indonesia mengalami transisi dalam segala bidang, termasuk politik. Pengaruh budaya barat (*liberalisme*) mulai tampak dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia menjadi lebih kritis pemikirannya, termasuk dalam mengungkapkan pendapat mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini kemudian menggeser paradigma bangsa Indonesia menuju kearah Demokrasi Deliberatif. Menurut David Held (Rahman, 2010:30), Demokrasi Deliberatif ialah suatu bentuk demokrasi dimana terdapat persyaratan kelompok politik yang dilakukan dengan kesepakatan warga negara yang bebas dan berdasarkan pada nalar. Kemampuan “justifikasi mutual” dan keputusan politik merupakan dasar utama untuk mencari permasalahan kolektif.

Prinsip demokrasi deliberatif adalah menjunjung hak satu kelompok ataupun individu, sekaligus juga melindungi hak kolektivitas. Demokrasi deliberatif mensyaratkan keadilan, kesetaraan dan distribusi yang merata. Artinya, setiap institusi sosial tergabung dalam sistem sosial, hingga mereka menjalankan tanggung jawab dan haknya, kemudian membentuk pembagian keunggulan-keunggulan masing-masing yang muncul melalui kerja sama dalam kehidupan sosial.

Proses demokrasi deliberatif tidak akan melewati komunikasi yang terjalin. Terutama komunikasi politik. Banyak sekali para ahli menyampaikan pendapat tentang definisi komunikasi politik. Tetapi pada dasarnya inti dari pernyataan para ahli adalah sama. Seorang ahli Michael Rush dan Phillip Althoff dalam handout perkuliahan Rusnaini (2008:34) menjelaskan “komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik”. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan (Cangara, 2009).

Komunikasi politik dalam demokrasi deliberatif tentu membahas tentang pemerintahan, entah itu kebijakan politik maupun kebijakan publik. Kebijakan politik menurut Robert Eyestone secara luas adalah hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya, konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Sedangkan Thomas R. Dye

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan walaupun batasannya cukup membedakan antara apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah (Nimmo, 2006).

Menurut Anderson, konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi yakni (1) Membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik. (2) Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. (3) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. (4) Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah (Nimmo, 2010).

Demokrasi deliberatif dapat terwujud dengan adanya partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui ruang publik. Ruang publik menjadi hal terpenting dalam pelaksanaan Demokrasi Deliberatif. Ruang publik merupakan ruang demokratis, wahana diskursus masyarakat warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhannya secara diskursif. Ruang publik tidak hanya sebagai institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi antar warga itu sendiri. Ruang publik adalah tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi. Ruang publik memungkinkan warganegara bebas menyatakan pendapat karena ruang publik menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan warga negara untuk menggunakan kekuatan argumen (Hardiman, 2008:134).

Demokrasi deliberatif juga membutuhkan peran dari warga negara. Peran warga negara dan ruang publik sebagai media demokrasi deliberatif. Habermas memahami ruang publik politis terutama sebagai jejaring untuk komunikasi tema-tema dan sikap-sikap yakni opini-

opini. Ruang publik politis terdapat dimana saja para warga negara bertemu untuk mendiskusikan tema-tema yang relevan untuk masyarakat. Ruang publik tidak tunggal, melainkan majemuk seperti juga bentuk-bentuk komunikasi dan forum-forum warga yang berciri pluralistis. Ruang publik hidup dan tumbuh dari hubungan-hubungan saling pengertian secara intersubjektif di antara warga negara yang berlangsung dalam bahasa sehari-hari, yakni dari tindakan komunikatif. Habermas menghubungkan konsep ruang publik politisnya ini dengan konsep “masyarakat warga”. Konsep ini tidak hanya mengkonkritkan konsep ruang publik secara sosiologis, yakni dalam kaitanya dengan proses-proses sosial yang sedang berlangsung, melainkan juga memungkinkan untuk membuktikan basis organisatoris ruang publik politis di dalam masyarakat-masyarakat kompleks yang terglobalisasi dewasa ini (<http://edukasi.kompasiana.com/2012/01/12/jurgen-habermas-demokrasi-deliberatif-dan-ruang-publik/>, diakses 09 Februari 2012).

Masyarakat warga menurut Habermas tidak dapat disamakan dengan konsep liberal tentang “masyarakat borjuis”. Konsep terakhir ini terutama menjelaskan hubungan-hubungan ekonomis para warganegara sebagai subjek hak-hak privat atau sebagai sebuah sistem kebutuhan (*System Der Bedurfnisse*). Seperti sudah dikatakan, masyarakat warga membedakan dirinya dari pasar dan negara dan otonom dari kekuatan itu. Jika para warganegara secara bebas mencapai kesepakatan untuk meraih tujuan-tujuan sosial politis mereka dan membutuhkan sebuah asosiasi otonom yang lepas dari kepentingan-kepentingan birokrasi dan pasar, terbentuklah kelompok-kelompok masyarakat warga. Masyarakat warga terdiri atas perhimpunan-perhimpunan, organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang kurang lebih bersifat spontan yang menyimak, memadatkan dan secara nyaring meneruskan resonansi keadaan persoalan masyarakat di dalam wilayah-wilayah privat kedalam ruang publik politis (<http://politik.kompasiana.com/2011/04/10/kebijakan-publik-dalam-prespektif-habermas-potensi-demokrasi-deliberatif/>, diakses 09 Februari 2012).

Salah satu ruang publik di wilayah Surabaya adalah Taman Bungkul. Taman Bungkul sebagai ruang publik menjadi tempat untuk berkumpul bagi sebagian orang atau berbagai komunitas, seperti: komunitas *online*, komunitas sepeda SENOPATI, paguyuban sepeda kuno arek Surabaya, dan lain-lain(<http://www.bukik.com/2011/06/01/komunitas-dan-taman-kota-surabaya/>, diakses 09 Februari 2012).

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang, pada intinya penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: (a) Bagaimana penggunaan Taman Bungkul

sebagai ruang publik dalam mewujudkan Demokrasi Deliberatif ? (b) Mengapa Taman Bungkul dijadikan sebagai sarana dalam perwujudan Demokrasi Deliberatif ? Dengan menjawab pertanyaan yang ada diharapkan mampu mencapai tujuan yaitu untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan atau yang diadakan di Taman Bungkul dan untuk mengetahui alasan Taman Bungkul dijadikan sebagai sarana dalam perwujudan Demokrasi Deliberatif.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian berorientasi pada gejala yang bersifat alami yang dilakukan di lapangan (Ali, 1983:159). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan Penggunaan Taman Bungkul Surabaya sebagai Ruang Publik dalam Mewujudkan Demokrasi Deliberatif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Taman Bungkul yang berlokasi Jalan Raya Darmo Surabaya. Perkiraan waktu yang dibutuhkan mulai dari tahap pengajuan judul sampai pada penyusunan laporan penelitian adalah bulan Januari 2012 – Juli 2012.

Di dalam penentuan informasi adalah didasarkan kepada sejumlah keterampilan interpersonal. Termasuk disini mengajukan berbagai pertanyaan, mendengarkan bukannya berbicara, mengambil sikap pasif bukan sikap tegas, menampakkan minat verbal terhadap orang lain, serta menunjukkan minat dengan kontak mata (Nasution, 1997:61). Teknik ini digunakan dalam penentuan sampel dengan pertimbangan bahwa peneliti melibatkan beberapa pihak untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mendalam sebagai data penelitian. Pertama-tama dipilih satu atau dua orang. Peneliti memilih komunitas yang ada dan sekiranya membicarakan berbagai macam kebijakan politik sebagai pemberi informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi*, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2009: 241). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serepak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode (1) observasi *non-partisipan* yaitu peneliti datang ke lokasi yaitu taman bungkul. Pengamatan ini berfungsi juga sebagai pengenalan terhadap lapangan bagi peneliti. Pemahaman tentang lapangan, termasuk subjek penelitian akan membantu dalam melakukan wawancara

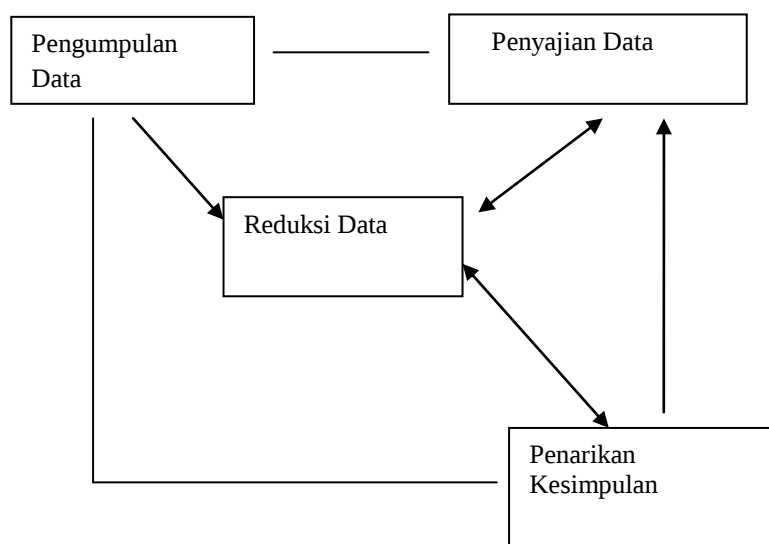
mendalam sebagai langkah berikutnya. (2) Dokumentasi digunakan catatan yang dibukukan sebagai acuan untuk mengetahui apa saja yang terjadi. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan untuk mendapatkan foto-foto hasil kegiatan di lapangan, sehingga akan lebih memperkuat data yang dihasilkan. Teknik yang terakhir yaitu (3) Wawancara Mendalam yaitu wawancara bebas terpadu (terpimpin), yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, selanjutnya peneliti mengembangkan pertanyaan saat wawancara.

Penelitian dimulai dari tahap-tahap berikut ini:

Tabel 1 Tahap-Tahap Penelitian

| No | Tahap-tahap yang dilakukan         | Kegiatan yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tahap Persiapan                    | Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan proposal penelitian yang didalamnya akan dibahas tentang latar belakang permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian dan manfaat dilakukannya suatu penelitian yang terangkum dalam BAB I, kajian pustaka yang mendukung penelitian sebagai dasar teori dan pisau analisis yang terangkum dalam BAB II, dan metode penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang terangkum dalam BAB III. |
| 2  | Tahap Pembuatan Instrumen          | Pada tahap ini dilakukan pembuatan instrument penelitian, peneliti membuat kisi-kisi instrument agar dapat menjawab permasalahan yang telah disajikan untuk digunakan dalam pengambilan data dari lapangan yaitu Taman Bungkul Surabaya.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | Tahap Pelaksanaan Pengambilan Data | Pada tahap ini akan dilakukan pengambilan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang telah dipilih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | Analisis Data                      | Pada tahap ini data yang sudah didapatkan dari observasi, dokumentasi dan wawancara akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk ditarik kesimpulan yang akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai pembuatan penggunaan taman bungkul sebagai ruang publik untuk mewujudkan demokrasi deliberatif.                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Tahap Pembuatan Laporan            | Tahap ini merupakan tahap yang paling akhir, tahap ini akan dilakukan pembuatan laporan yang merujuk pada hasil analisis data. Selain itu, pada tahap ini proposal akan disempurnakan menjadi laporan skripsi yang di dalamnya akan dilengkapi dengan hasil dan pembahasan terhadap rumusan masalah serta pembuatan kesimpulan dan saran.                                                                                                                                                                                        |

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yang digunakan model Miles and Huberman (*Sugiyono, 2009:247*). Secara lebih jelas langkah-langkah dalam analisis data dapat dilihat dalam skema berikut.



*Skema 1. Analisis Data Penelitian*

Instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL PENELITIAN

Taman Bungkul merupakan salah satu taman yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya. Taman ini menjadi taman yang paling banyak dikunjungi oleh warga Surabaya, karena lokasinya yang strategis dengan fasilitas yang cukup lengkap. Luas taman Bungkul sekitar  $\pm 3,568 \text{ km}^2$  dengan batas-batas (a) Sebelah Utara : Wonokoyo Group, (b) Sebelah Timur : RS TNI AU Soemitro, (c) Sebelah Selatan : Jln Taman Bungkul, dan (d) Sebelah Barat : Jln Raya Darmo, Bank Bukopin, dan Esia Center.

Taman Bungkul sekarang ini telah banyak terjadi perubahan seiring dengan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang ingin menyediakan ruang terbuka hijau bagi warga Surabaya. Kondisi Taman Bungkul sekarang ini sudah berubah 180' dari sekitar 3 tahun yang lalu. Taman kota yang sebelumnya kurang diperhatikan keberadaannya, seperti kondisi yang tidak terawat dengan baik, sekarang telah menjadi taman wisata yang ramai dikunjungi setiap hari oleh warga Surabaya, dari pagi, siang, sore, dan malam hari.

Keberadaan taman Bungkul Surabaya sebagai salah satu tempat untuk hiburan dan ruang publik. Para pengunjung atau masyarakat dapat menggunakannya sebagai tempat berkumpul dan bertemu tanpa membedakan status sosial. Kesamaan visi dan misi yang dimiliki sekelompok orang mengerucut pada terbentuknya suatu komunitas. Komunitas yang ada di taman Bungkul ini tidak serta merta hanya sekedar duduk dan membicarakan komunitasnya, tetapi ada komunitas yang membahas mengenai suatu kebijakan pemerintah bahkan ada yang terlibat langsung di dalamnya.

Komunitas-komunitas yang berada di taman Bungkul begitu beragam, dimulai dari komunitas sepeda onthel tua seperti komunitas SENOPATI, PASKAS, komunitas sepeda taman Bungkul dan lain-lain. Komunitas-komunitas yang ada di taman Bungkul Surabaya, merupakan suatu bentuk apresiasi warga kota Surabaya sebagai tempat untuk berkumpul dengan teman-teman, baik sebagai sarana rekreasi bersama sehingga fungsi taman bungkul sebagai ruang publik terwujud dengan baik.

Penggunaan taman Bungkul dari kalangan masyarakat sangat beragam sesuai dengan kesenangan sendiri. Taman Bungkul bisa menjadi tempat rekreasi keluarga, juga bisa menjadi tempat berkumpul komunitas-komunitas yang ada di Surabaya. Komunitas-komunitas ini menggunakan taman Bungkul sebagai tempat berkumpul. Taman bungkul sangat tepat dijadikan tempat berkumpul karena lokasinya yang strategis, mudah diakses, tempat yang terbuka bagi siapapun, serta tersedianya fasilitas yang memadai. Salah satu komunitas yang ada di taman Bungkul ialah komunitas sepeda onthel yang beraktivitas dengan sesama komunitasnya di taman Bungkul ialah pada hari Selasa dan Minggu. Salah satu komunitas yang menggunakan taman Bungkul sebagai tempat berkumpul ialah komunitas Sepeda Kuno Patriot Sejati (SENOPATI).

Setiap kali berkumpul SENOPATI selalu membahas kegiatan yang akan dilakukan komunitas tersebut. Selain itu juga hal ihwal kehidupan bermasyarakat bahkan tidak ketinggalan untuk membahas tentang kebijakan pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Selaku ketua SENOPATI, bapak Soetopo mengutarakan mengenai hal-hal yang dibicarakan ketika berkumpul dengan komunitasnya:

*“...yang dibicarakan ketika kami berkumpul yang jelas pertama-tama bertanya kabar setiap anggota. Saya tidak membatasi anggota saya untuk membicarakan apa saja yang penting tidak merugikan orang banyak. Ketika berkumpul banyak anggota berargumentasi atau menyampaikan pendapatnya mengenai kelangggan SENOPATI dan membahas permasalahan pekerjaan mereka. Ada juga yang membahas mengenai*

*politik dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat karena kebijakan tersebut diperuntukkan bagi golongan tertentu saja.”(Bapak Soetopo)*

Terkait dengan hal yang dibahas oleh Komunitas SENOPATI di Taman Bungkul, Wakil ketua 1 SENOPATI, bapak Bambang Soemargono menjelaskan:

*“Hal yang menjadi pembicaraan dalam setiap berkumpul membahas kelangsungan dan acara-acara yang akan dilakukan SENOPATI. Ketika pembicaraan lingkup SENOPATI selesai, selanjutnya membahas hal-hal yang terjadi di negeri ini, baik itu politik, hukum, ekonomi dan kebijakan. Seperti isu tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak dan realisasi kebijakan pemerintah terkait jalan khusus untuk sepeda onthel. Ketua SENOPATI atas nama komunitas juga ikut andil dalam kebijakan pemerintah terkait jalan khusus sepeda onthel.”(Bapak Bambang Soemargono)*

Taman Bungkul seolah telah menjadi tempat yang pantas dan sesuai untuk membahas permasalahan di pemerintahan. Bukan hanya untuk kesenangan tetapi juga untuk masa depan dan kenyamanan bersama warga masyarakat. Ketua SENOPATI, bapak Soetopo juga mengutarakan jawabannya terkait permasalahan politik yang dibahas.

*“Membicarakan negara atau politik ya pasti, karena saya kan pensiunan DPRD kota Surabaya, dulu menjabat sebagai ketua Humas. Kalau apa saja kebijakan yang pernah dibicarakan dalam setiap pertemuan ya banyak. Contohnya terkait lumpur Lapindo, isu kenaikan Bahan Bakar Minyak, korupsi yang semakin hari semakin banyak terungkap apalagi sekarang korupsinya ada di mana-mana seperti di Dirjen Pajak, Kehakiman, partai politik dan masih banyak lagi yang lainnya dan yang jelas di komunitas saya banyak sekali yang membahas mengenai politik atau kebijakan pemerintah baik itu pusat ataupun daerah”.*(Bapak Soetopo)

Perbincangan yang dilakukan oleh komunitas SENOPATI pernah menjadi hal yang direalisasikan ke dalam kehidupan nyata, baik itu perbincangan mengenai lingkup dari SENOPATI atau lingkungan masyarakat dan pemerintahan. Hal yang demikian ini bisa menjadi wujud dari Demokrasi Deliberatif. Komunitas SENOPATI secara tidak sadar telah melakukan suatu tindakan demokrasi deliberatif dengan berusaha untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Berikut penuturan pak Topo:

*“itu tentu ada, kalau yang direalisasikan banyak. Ketika akan mengikuti lomba kita bahas bersama-sama dulu, trus setelah ada kesepakatan kita wujudkan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Kita berusaha menjadi warga negara yang demokratis. Selain itu, sebelum ada jalur kiri untuk sepeda onthel (jalur khusus sepeda). Ada salah satu anggota berpendapat agar disampaikan kepada ibu wali kota Surabaya terkait keinginan dia mengenai diberlakukannya jalan khusus sepeda onthel, karena waktu dia bersepeda di sepanjang jalan raya Darmo di serempet oleh mobil dan mobil tersebut lari dan tidak tanggung jawab padahal kondisi dia agak parah. Kemudian saya mengirim surat kepada ibu Risma untuk memberikan ruang sedikit saja bagi pengendara sepeda onthel dan tidak lama kemudian saya di undang untuk membahas permasalahan*

*ini terkait kebijakan pemerintah kota Surabaya mengenai jalan khusus sepeda onthel.”(Bapak Soetopo)*

Pendapat mengenai realisasi jalur khusus sepeda juga disampaikan oleh Irmanov, selaku sekretaris dari SENOPATI.

*“...saya setuju dengan adanya jalur sepeda ini, selama tidak mengganggu. Sepeda itu kalau disuruh orang menghemat itu kita sudah menghemat. Hari minggu waktu “car free day” berapa bensin yg sudah dihemat, dan berapa polusi yang dikurangi, tetapi sekarang ada kebijakan tentang uang muka minimal untuk beli sepeda motor itu juga bagus untuk mengerem penjualan sepeda motor dan yang tidak kalah setujunya waktu tahu ada kebijakan pemerintah terkait jalan raya di lajur paling kiri di peruntukkan untuk pengendara sepeda onthel..”(Irmanov)*

Hal yang dilakukan oleh komunitas SENOPATI adalah untuk kemaslahatan bersama seluruh warga masyarakat. Perwujudan demokrasi deliberatif adalah untuk kepentingan orang banyak, “masyarakat-warga” kota Surabaya. Perwujudan yang paling nyata dari Demokrasi Deliberatif ialah diberlakukannya jalur khusus sepeda Onthel. Dengan dibuatnya jalur khusus sepeda Onthel, dapat membantu aktivitas para pengendara sepeda Onthel agar merasa lebih aman saat berada di jalan raya. Akan tetapi dalam usaha merealisasikan aturan baru tersebut terdapat selingan pencantuman merk dagang di sepanjang jalur khusus sepeda. Yaitu merk dagang Cat EMCO.

Merk dagang cat EMCO berada di sepanjang jalur khusus sepeda di Raya Darmo-Urip Sumoharjo-Basuki Rahmat-Gubernur Suryo. Menurut informasi yang didapat, adanya merk cat EMCO di sepanjang jalan itu merupakan salah satu program pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan swasta tersebut. Mengenai adanya merk dagang tersebut, Irmanov sebagai perwakilan dari SENOPATi mengutarakan pendapat sebagai berikut:

*“kalau menurut saya tidak ada masalah. Dengan semua itu, siapa tahu itu adalah suatu bentuk kerjasama antara pihak perusahaan swasta dengan pemerintah kota untuk membangun kota ini jadi lebih baik. Dengan kerjasama yang baik kan akan jadi lebih mempermudah pembangunan di kota ini.”(Irmanov)*

Bapak Soetopo, selaku ketua komunitas SENOPATI, mengaku tidak keberatan dengan adanya logo perusahaan swasta tersebut, asalkan itu adalah demi kepentingan pembangunan kota Surabaya dan tidak ada kepentingan promosi. Berikut penuturan pak Topo:

*“adanya logo perusahaan swasta di jalur sepeda onthel, selama itu untuk kepentingan bersama tidak ada apa-apa. Artinya kan ada kerjasama yang menguntungkan bagi pihak perusahaan, pemerintah dan tentu saja warga masyarakat. Akan tetapi kalau ada niatan pribadi dari pihak EMCO itu tadi, untuk promosi dan*

*supaya barangnya laku saya sangat tidak setuju, karena pihak perusahaan punya niat untuk menguntungkan diri sendiri.”(Bapak Soetopo)*

Pak Soetopo dan Irmanov memberikan jawaban yang hampir sama, berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh bapak Bambang Suemargono:

*“saya sangat tidak setuju mbak kalau ada logo perusahaan cat di jalur sepeda onthel, karena itu nyata-nyata program yang dibuat oleh pemerintah dengan mengeluarkan dana anggaran dari pemerintah daerah dijadikan ajang promosi oleh perusahaan cat milik swasta tersebut.”(Bambang Soemargono)*

## **PEMBAHASAN**

### **Penggunaan Taman Bungkul Sebagai Ruang Publik**

Berdasarkan metode pengumpulan data yang telah dilakukan taman Bungkul sebagai ruang publik tidak hanya untuk komunitas ataupun orang tertentu saja tetapi semua orang dan komunitas boleh beraktifitas dan berekspresi di taman Bungkul ini. Jorgen Habermas mengatakan bahwa ruang publik memberikan peran yang penting dalam proses demokrasi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Artinya, kebebasan berpendapat di forum publik adalah hak dari setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan pada pasal tersebut taman Bungkul bisa menjadi tempat bagi semua orang berhak berekspresi dan mengeluarkan pendapat.

Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Taman Bungkul sebagai ruang publik terlihat dengan banyaknya masyarakat yang berkunjung di tempat ini dan banyaknya sponsor terkenal yang ikut andil dalam melestarikan dan menjaga kelangsungan taman Bungkul. Pada hari minggu pagi di tengah-tengah taman Bungkul di gunakan untuk senam dan siapa saja boleh ikut yang di acarai oleh semanggi senam pagi Indonesia.

Perkumpulan berbagai komunitas yang ada di kota Surabaya menjadikan taman bungkul sangat ramai sehingga pedagang kali lima yang berjualan berbagai macam makanan dan minuman serta mainan anak-anak menjadi laku dan ramai di beli oleh pengunjung. Televisi swasta milik Surabaya yaitu SBO, JTV juga tidak ketinggalan membuat acara music yang meramaikan taman Bungkul sehingga *car free day* terasa begitu menyentuh. Hari minggu yang ramai sekali sponsor andalan taman Bungkul seperti Jawa Pos dan Telkom juga mengadakan acara sehingga di pagi hari warga masyarakat dapat memilih hiburan yang

dikehendaknya dan bagi pengunjung taman Bungkul yang beruntung di foto oleh wartawan Jawa Pos dengan keunikan tertentu akan mendapatkan hadiah senilai Rp 100.000;

### **Penggunaan Taman Bungkul dalam Wujud Demokrasi Deliberatif**

Perwujudan Demokrasi Deliberatif di taman Bungkul Surabaya yaitu terdapatnya suatu komunitas yang ada di taman Bungkul yang ikut andil dalam memutuskan suatu kebijakan pemerintah kota Surabaya. Kebijakan Pemerintah tersebut seperti keputusan pemerintah terkait lajur paling kiri diperuntukkan untuk sepeda onthel. Walaupun banyak berbagai pihak yang tidak menyetujui tetapi kebijakan terhadap sepeda onthel terlaksana dengan adanya tanda sepeda onthel sebelah kiri jalan dan ditandai dengan warna jingga (*orange*).

Komunitas yang terkait dengan kebijakan tersebut yaitu komunitas sepeda onthel SENOPATI yang diketuai oleh seorang pensiunan DPRD dengan jabatan ketua Humas bapak Soetopo. Proses terealisasinya kebijakan tersebut sangat tidak tepat atau mundur dari jadwal yang telah disepakati yaitu tanggal 1 Januari 2012 tetapi terealisasi mulai bulan Mei 2012. Awal mula diperlakukannya jalan khusus sepeda onthel dengan memperbaiki jalan yang berlubang dan rusak dengan cara mengaspal setelah itu pengecatan jalan dengan warna hijau tua dan gambar sepeda onthel dengan warna putih. Seiring berjalannya kebijakan tersebut dan masih banyaknya pelanggaran pengendara bermotor yang memakai jalur khusus sepeda onthel pemerintah bekerja sama dengan cat EMCO untuk menambah warna jalan khusus sepeda onthel dengan warna jingga (*orange*).

Taman Bungkul merupakan taman terbuka hijau yang terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana untuk pengunjung dapat merasa nyaman berada di taman. Taman Bungkul sebagai ruang publik juga mempunyai banyak peran dan fungsi bagi masyarakat. Selain sebagai tempat rekreasi dan sarana menyegarkan pikiran (*refreshing*), juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mewujudkan demokrasi Deliberatif seperti membicarakan kebijakan negara yang kurang tepat, lebih menguntungkan golongan dan sekaligus berperan aktif dalam menentukan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perwujudan Demokrasi Deliberatif sendiri mengacu pada berbagai kebijakan pemerintah terkait pada kepentingan orang banyak sehingga peran taman Bungkul penting. Dari banyaknya komunitas yang ada di taman Bungkul komunitas SENOPATI yang memiliki peran dalam mewujudkan Demokrasi Deliberatif seperti apa yang dibicarakan dalam setiap pertemuan direalisasikan dalam bentuk nyata sehingga ada ruang diskursus dengan

pemerintah terkait. Komunitas SENOPATI sendiri memiliki keterikatan dengan kebijakan pemerintah dalam memberlakukan lajur paling kiri untuk sepeda onthel. SENOPATI selain memiliki keterikatan dengan kebijakan pemerintah komunitas ini juga memiliki visi dan misi yang sama yaitu dapat bersepeda kapan saja di jalan raya tanpa harus merasa takut ataupun was-was.

Proses realisasi pemerintah mengenai sepeda onthel ini terwujud pada bulan Mei 2012 walaupun agenda sebelumnya bahwa per 1 Januari 2012 sudah ada kebijakan tentang lajur paling kiri untuk sepeda onthel dengan bukti nyata di sepanjang jalan raya Darmo, Urip Sumohardjo, Basuki Rahmat, Gubernur Suryo, dengan ditandai warna hijau jalan khusus sepeda onthel. Tetapi sejak tanggal 25 juni 2012 di sepanjang jalan Raya Darmo sampai Basuki Rahmat warna Khusus sepeda Onthel berganti warna jingga (orange) dengan sponsor cat EMCO. Penambahan warna hijau di sekitar warna jingga (orange) untuk menyadarkan kepada masyarakat khususnya pengendara kendaraan bermotor sadar dan tahu betul bahwa tempat tersebut khusus untuk sepeda onthel sehingga tidak ada pelanggaran serta mendisiplinkan warga Surabaya untuk taat dan patuh pada peraturan lalu lintas karena peraturan ini sesungguhnya untuk keselamatan semua orang. Kebijakan pemerintah ini di sambut dengan antusias oleh warga Surabaya dengan semakin banyaknya warga Surabaya menggunakan sepeda onthel dalam beraktifitas. Kesadaran warga Surabaya yang beralih ke sepeda onthel sehingga polusi di Surabaya semakin berkurang.

Komunitas SENOPATI juga tidak tinggal diam mereka bersama komunitas lainnya memanfaatkan kebijakan pemerintah dengan sering menggunakan jalan khusus sepeda onthel yaitu lajur paling kiri. SENOPATI salah satu komunitas yang mewujudkan Demokrasi Deliberatif, pihak dari SENOPATI berani untuk mengutarakan keinginannya dalam mewujudkan jalur khusus untuk sepeda onthel meskipun tidak secara langsung disampaikan kepada pihak pemerintah kota.

### **Respon Komunitas Paguyuban SENOPATI dalam Mewujudkan Demokrasi Deliberatif**

Respon merupakan hasil dari adanya suatu stimulus. Adanya stimulus dapat menimbulkan kegiatan yang simultan terjadi sehingga berdampak kepada lahirnya suatu respon atau tanggapan. Begitu halnya dengan adanya stimulus tentang kebijakan pemerintah yang membuat jalur khusus sepeda tentu akan menimbulkan respon dan tanggapan yang bermacam-macam, apakah itu bersifat positif, yang setuju dengan kebijakan tersebut atau

negatif, yang kurang atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Namun respon ini jangan dipahami sebagai janganlah dianggap sebagai suatu kritikan yang ingin menghancurkan, melainkan sebagai alat untuk menjadi penilaian agar pemerintah dapat bertindak lebih bijaksana lagi.

Respon positif timbul disaat setiap orang menyetujui adanya jalur untuk sepeda, karena mengindikasikan bahwa pemerintah telah memperhatikan para pengguna sepeda onthel. Dengan adanya jalur sepeda onthel, para pengguna sepeda onthel jadi lebih merasa aman karena punya jalur tersendiri, sehingga merasa tidak perlu berebut jalan dengan sepeda motor dan kendaraan roda empat. Jalur khusus sepeda akan semakin mempermudah para pengguna sepeda pancal atau onthel dalam bersepeda dan menyalurkan hobinya. Hal ini diamini oleh komunitas SENOPATI sebagai suatu hal yang positif dan berguna bagi warga masyarakat.

Tujuan yang baik dengan diadakannya jalur khusus sepeda memang menjadi bahan kajian utama, tetapi dalam kenyataan sering kali berbeda. Banyak kalangan yang berkeinginan untuk menggunakan jalur khusus sepeda itu dengan rasa aman dan nyaman. Malah mereka masih merasa was-was dengan adanya para pengguna sepeda motor dan roda empat yang kadang masih main serobot dan seenaknya saja menggunakan jalur khusus sepeda. Hal ini diakui oleh pak Amin yang berkeinginan mengantarkan anaknya dengan memanfaatkan jalur khusus sepeda.

Selain itu, adanya logo merk dagang perusahaan cat milik swasta di jalur khusus sepeda juga mengundang kontroversi. Pihak yang pro menganggap bahwa adanya nama logo cat EMCO adalah suatu bentuk CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban dari cat EMCO terhadap pihak pemerintahan Surabaya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan orang banyak. Hal ini dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak ada masalah.

Hal berbeda justru diungkapkan oleh pihak lain, yaitu pak Adi sutarwijono, sebagai anggota DPRD komisi C, dia menyayangkan adanya logo EMCO. Dia beranggapan bahwa sebaiknya logo itu segera dihapus karena hanya bertujuan untuk promosi dan menguntungkan bagi pihak EMCO sendiri. Dia juga mengatakan bahwa pada waktu perencanaan pembuatan kebijakan itu tidak ada nama EMCO, walaupun ada mungkin dia tidak akan disetujui.

Di sisi lain pemerintah diuntungkan karena adanya sponsor EMCO, warna yang semula di berikan pemerintah dengan warna hijau tua kurang dilihat ataupun kurang terang sehingga warna jingga (*orange*) yang diberikan cat EMCO dapat terlihat dengan jelas dan

menyadarkan masyarakat kalau tempat tersebut jalan khusus sepeda onthel. Tetapi yang perlu di sesalkan ada nama EMCO di sepanjang jalan, hal ini yang menjadi tanda Tanya yang besar bagi sebagian orang. EMCO yang memberikan namanya di pojok tanda jingga (*orange*) memiliki motif tersendiri ataupun yang lainnya karena cat EMCO adalah nama Dagang suatu perusahaan sehingga ditakutkan adanya sindikat mempromosikan cat tersebut ataupun yang lainnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari penelitian yang dilakukan kemudian dianalisis secara seksama dan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penggunaa taman Bungkul sebagai ruang publik dalam mewujudkan demokrasi Deliberatif benar-benar ada dan nyata. Terbukti dengan salah satu komunitas yang ada di taman Bungkul ikut andil dan berperan aktif dalam membuat dan merancang suatu kebijakan pemerintah. Komunitas tersebut yaitu komunitas SENOPATI. (2) Taman Bungkul dijadikan sebagai sarana dalam perwujudan demokrasi Deliberatif yaitu melalui suatu komunitas yang ada di taman Bungkul dan dalam setiap pertemuannya selalu membahas terkait apa yang akan dikerjakan ataupun yang diputuskan untuk kepentingan bersama. Seperti Komunitas SENOPATI yang ikut andil dalam memberlakukan jalan khusus sepeda onthel dan telah diputuskan oleh pemerintah kota Surabaya. Taman Bungkul dijadikan sarana demokrasi Delibratif karena taman Bungkul yang benar-benar menunjang dan banyaknya fasilitas yang diberikan serta lingkungan yang nyaman, sejuk dan rindang membuat banyak komunitas yang menjadikan tempat tersebut untuk berkumpul, berekspresi dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan UUD negara kita.

### **Saran**

Dari berbagai temuan yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, maka sebagai saran dan masukan adalah sebagai berikut: (1) Penggunaan taman Bungkul sebagai ruang publik harus selalu di jaga keberadaannya sehingga lebih banyak komunitas-komunitas yang berkumpul ddi tempat tersebut. (2) Komunitas SENOPATI sebaiknya tidak hanya kebijakan terkait sepeda onthel saja yang aktif dan ikut andil dalam merencanakan kebijakan pemerintah kota Surabaya, kalau perlu kebijakan-kebijakan yang lainnya sehingga wujud dari demokrasi Deliberatif semakin kuat dan nyata dan taman bungkul sebagai ruang publik tidak hanya untuk nongkrong atau tempat untuk santai-santai saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Hardiman, F. 2008 *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Stategi. Demokrasi Deliberatif: Menimbang “Negara Hukum” dan Ruang Publik” dalam teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Habermas, Jurgen. 2007. *Teori Tindakan Komunikasi: Kritik atas Rasio Fungsionalis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Miles, Mathew B dan Habermas, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kuantitatif*. Terjemahan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nasution, S. 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nimmo, Dan. 2006. *Komunikasi Politik*. Bandung: Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. Bandung: Rosdakarya.
- Rahman, Arifin. 2010. *Demokrasi dan Masyarakat Beradab*. Surabaya: Jurusan PMPKN FIS Unesa.
- Rahmat, Jalaluddin. 1986. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya CV Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- UUD 1945 Amandemen.
- <http://edukasi.kompasiana.com/2012/01/12/jurgen-habermas-demokrasi-deliberatif-dan-ruang-publik/>, diakses 09 Februari 2012.
- <http://politik.kompasiana.com/2011/04/10/kebijakan-publik-dalam-prespektif-habermas-potensi-demokrasi-deliberatif/>, diakses 09 Februari 2012.
- <http://www.bukik.com/2011/06/01/komunitas-dan-taman-kota-surabaya/>, diakses 09 Februari 2012.